



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**

P E N G U M U M A N

Nomor: **2** /PP.04.02-PU/7102/Kab/I/2020

Tentang:

PERPANJANGAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

Berdasarkan Berita Acara nomor 10/PP.04.2-BA/7102/KPU-Kab/I/2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, maka dengan ini mengumumkan PERPANJANGAN PENDAFTARAN PPK Kecamatan :

- 1. KECAMATAN TOMPASO**
- 2. KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT**
- 3. KECAMATAN LANGOWAN UTARA**
- 4. KECAMATAN LANGOWAN SELATAN**

dengan alasan tidak terpenuhi jumlah peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah anggota PPK yang dibutuhkan.

Perpanjangan pendaftaran PPK dimulai pada tanggal **25 s/d 27 Januari 2020**, dengan persyaratan pendaftar sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

- f. Berdomisili di dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah menengah Atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

Penghitungan jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut :

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
 - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan suratb pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. Surat pernyataan mempunyai Integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;

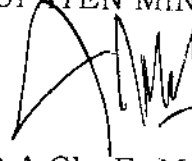
- d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
 - e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
 - f. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - g. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
 - h. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - i. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - j. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 - k. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan .
 - l. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.
 - m. Surat keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU kabupaten Minahasa; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
- Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke sekretariat KPU (Kabupaten Minahasa) melalui pos atau email dengan alamat kab_minahasa@kpu.go.id Paling lambat tanggal 27 Januari 2020

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tondano, 25 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name of the official.

LORD A.Ch. E. MALONDA